

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arba, dan Diman Ade Mulada. *Hukum hak tanggungan: hak tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Badriyah, Siti Malikhatun. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya: Analisis Hukum Praktis*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2015.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jilid 2*. Djambatan, 2008.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017

Kallo, Erwin. *Sistem Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif hak tanggungan elektronik*. Bandung: Refika Aditama, 2020.

Koeswahyono. *Dasar-dasar Hukum Pertanahan*. Malang: UMM Press, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

- Miles, Matthew B., dan A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Patrik, Purwahid, dan Kashadi. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006.
- Priyono, Ery Agus. *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2003.
- Setiabudi, Jayadi. *Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah beserta Perizinannya*. Yogyakarta: Penerbit Buku Pintar, 2015.
- Situmorang, Victor M., dan Cormentyna Sitanggang. *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradaya Paramitha, 2005.

- Sudaryanto. *Pokok-Pokok Kebijakan Undang-Undang hak tanggungan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1996.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suleiman, Tisnawati. *Manajemen Risiko dalam Sistem Informasi elektronik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Suleiman, Tisnawati. *Prinsip-Prinsip Hukum Agraria dalam Kerangka hak tanggungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Sumardjono, Maria S.W. *Dinamika Kebijakan Pertanahan dalam Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Sumardjono. *Tanah: dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Sutedi, Andrian. *Hukum hak tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Suteki, dan Taufani Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

b) Makalah, Artikel dan/atau Jurnal

Ariyanto, Didik. “Pelaksanaan Fungsi dan Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kabupaten Gombong, Semarang.” Universitas Diponegoro, 2006. <http://eprints.undip.ac.id/15474/>.

Asyhadie, Zaeni, dan Rahma Kusumawati. *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Badriyah, Siti Malikhatus. “Justice A Yearning in The Implementation of the Contract in the Society.” *Diponegoro Law Review* 2, no. 1 (28 April 2017): 154–71. <https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.154-167>.

Djakatara, Vanny, Hasbir Paserangi, dan Sri Susyanti Nur. “Implementasi Pendaftaran hak tanggungan Secara elektronik.” *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (7 April 2023): 183–93. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.184>.

Exaudia, Sara. “Implementasi Pelayanan hak tanggungan Terintegrasi Secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Batam.” Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2020. https://repository.stpn.ac.id/395/1/SARA_EXAUDIA-selection.pdf.

Halim, Sandi, Muhammad Yamin, Syafruddin Kalo, dan Rudi Haposan Siahaan. “Pelaksanaan Pendaftaran hak tanggungan Secara elektronik.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 8 (12 Desember 2022): 449–64. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.110>.

Kurniati, Nia, dan Efa Laela Fakhriah. “BPN sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016.” *Sosiohumaniora* 19, no. 2 (6 Juli 2017): 95–105. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999>.

Manurung, Abdul Azis. “Digitalisasi Birokrasi Agraria dalam hak tanggungan elektronik.” *Jurnal Hukum Non Diskriminatif* 2, no. 1 (2023): 83–86. <https://doi.org/10.56854/jhdn.v2i1.229>.

Pratomo, Suryo Adhi, Erny Kencanawati, dan Refki Ridwan. “Akibat Hukum Pendaftaran hak tanggungan Secara elektronik terhadap Kepastian Hukum Akta Pemberian hak tanggungan yang Dibuat Dihadapan PPAT yang Pendaftarannya Melewati Jangka Waktu.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 4 (5 April 2024): 1841–49. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i4.2556>.

Rachmayanti, Pradesti Elva, dan Ngadino Ngadino. “Peran dan Tanggung Jawab PPAT dalam Penerbitan Sertipikat hak tanggungan elektronik.” *Notarius* 15, no. 1 (2022): 230–40. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46037>.

Sahnan, M. Arba, dan Lalu Wira Pria Suhartana. “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 3 (30 November 2019): 436–51. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.714>.

Sari, Diah Ayu Permata, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Supriyadi Supriyadi, dan Endang Setyowati. “Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta

Tanah dalam Pendaftaran hak tanggungan di Kota Semarang.” *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 1 (2024): 181–92.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/9078/>.

c) Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendaftaran, Perubahan Data, dan Penghapusan hak tanggungan elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan hak tanggungan Terintegrasi Secara elektronik

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional